

Kajian Empirik tentang Pranata Pendidikan dalam Latar Budaya dan Organisasi

Bau Ratu¹

ABSTRAK

Proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha untuk mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran atau pelatihan atau salah satu wadah sosialisasi nilai-nilai yang ideal di masyarakat. Di Indonesia, berdasarkan ruang lingkungannya, pendidikan dapat digolongkan menjadi 3, yaitu pendidikan dalam keluarga (pendidikan informal), pendidikan sekolah (pendidikan formal) dan pendidikan di masyarakat (pendidikan nonformal). Sekolah memiliki peranan sebagai penerapan budaya kondusif, membuka harapan guru bahwa setiap siswa dapat sukses, menekankan pengajaran pada pembelajaran keterampilan, sistem tujuan pengajaran yang jelas bagi pelaksanaan monitoring dan penilaian keberhasilan kelas, dan memelihara kedisiplinan siswa. Keluarga memiliki beberapa fungsi dalam pendidikan diantaranya yaitu, fungsi biologis, edukatif, religius, protektif, sosialisasi anak, rekreatif, dan ekonomis.

Kata Kunci: pranata pendidikan, budaya organisasi

¹ Bau Ratu, Dosen Program Studi Bimbingan Konseling FKIP Universitas Tadulako, bauratu74@gmail.com

Empirical Study on Educational Institutions in Cultural and Organizational Background

Abstract

The process of changing the attitudes and behavior of a person or group of people in an effort to mature humans through teaching or training efforts or one of the socialization platforms for ideal values in society. In Indonesia, based on its scope, education can be classified into 3, namely education in the family (informal education), school education (formal education), and education in the community (non-formal education). Schools have a role as the application of a conducive culture, opening up teacher expectations that every student can be successful, emphasizing teaching on skills learning, a clear system of teaching goals for the implementation of monitoring and assessing class success, and maintaining student discipline. The family has several functions in education including biological, educational, religious, protective, child socialization, recreational, and economic functions.

***Keywords:** educational institutions, organizational culture*

PENDAHULUAN

Pranata pendidikan merupakan bagian yang sangat penting untuk mempersiapkan dan mengembangkan potensi individu, dimana individu akan 1) mampu berkompetensi dalam kehidupan; 2) mampu berfikir secara ilmiah dan logis; 3) terdorong mengembangkan potensi individu secara optimal; 4) merangsang untuk menumbuhkan sikap demokrasi; 5) mampu berkomunikasi dengan baik dan benar; dan 6) mampu meningkatkan kemampuan dalam menguasai teknologi dan riset ilmiah.

Dalam menyelenggarakan fungsinya pranata pendidikan mengacu pada UU Nomor 20 Tahun 2003 Bab IV Pasal 13 ayat 1, menyatakan bahwa pendidikan nasional diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal dan informal. Dalam konteks era global pendidikan tidak semata-mata menyiapkan individu menjadi warga Negara yang baik tapi menyiapkan individu menjadi warga Negara dunia yang mampu berkomunikasi dan berkolaborasi antar bangsa dan mengembangkan serta tertatanya basis nilai, pemikiran, dan moralitas bangsa, agar mampu menghasilkan generasi yang tangguh, kokoh dalam kepribadian, kaya dalam intelektual, dan unggul dalam penguasaan teknologi (Kartadinata, 2016). Peran pendidikan bergeser dari peran yang

berorientasi defisit ke peran yang berorientasi perkembangan (Griffin, 2012; dalam Kartadinata, 2016).

Pendidikan di Indonesia menitikberatkan ukuran keberhasilan pendidikan pada proses menguasai keterampilan dan mengakumulasi pengetahuan, sehingga siswa menempatkan sebagai pembelajar imitatif (Kartadinata, 2016). Selanjutnya ketidakberdayaanya pendidikan Indonesia dalam membangun jati diri bangsa, ketidakmampuan untuk merekonstruksi potensi bangsa secara responsif dan dinamis serta belum adanya blue print pendidikan yang konsisten dan jelas dalam mengembangkan potensi siswa, yang berdampak pada lemahnya kurikulum, metodologi, tenaga kependidikan, instrumen pendidikan, dampak globalisasi, kepentingan politik, sosial ekonomi, dan demografi.

Untuk itu perlu dilakukan upaya dalam membangun sistem pendidikan dengan paradigma dan orientasi pendidikan sebagai strategi kultural yang membawa supremasi nilai dan pendidikan pada aspek pragmatis teknis. Salah satu upaya yang dapat dikembangkan dalam proses pendidikan dengan memperkuat, memperkokoh dan menanamkan kembali pendidikan lintas budaya atau pendidikan kearifan lokal pada pendidikan formal, informal dan nonformal. Hal ini juga.

sejalan dengan strategi pendidikan nasional jangka panjang yaitu mendorong “global education”. Pengembangan kapasitas warga negara global dengan identitas lokal merupakan pengakuan atas entitas budaya dan kearifan lokal sebagai falsafah dan landasan nilai pendidikan (*etnopedagogy*).

Indigenous education atau pendidikan yang berbasis kearifan lokal dapat menguntungkan siswa dari segi kontekstual, cultural dan ekologis (King, L & Schielmann, 2004). Selain itu, pendidikan berbasis kearifan lokal dapat terwujud sebagai faktor pendukung kelestarian budaya atau cultural sustainability dari suatu Negara. Cultural sustainability terutama akan berdampak pada terpeliharanya jati diri atau identitas suatu bangsa, nilai-nilai kearifan lokal tersebut dapat diangkat dan diaktualisasikan dalam jalur pendidikan formal, informal dan nonformal (Nichol, 2011:121).

Berdasarkan pemikiran di atas, maka perlu menggali dan mengkaji pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal dari latar budaya dan organisasi. Selain itu, nilai-nilai *Indigenous education* tersebut diharapkan dapat menjadi pendekatan baru yang lebih sesuai secara kultural dan kontekstual untuk diterapkan di Indonesia, sebagai inovasi baru di tengah teori-teori

Barat yang selama ini melandasi pendidikan yang dilakukan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian *study kepustakaan (library research)*. Metode penelitian ini digunakan untuk menganalisis secara mendalam suatu konsep, teori atau fenomena dengan pendekatan ilmiah. Obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan (Arikunto, 2013).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pranata Pendidikan

a. Pendidikan

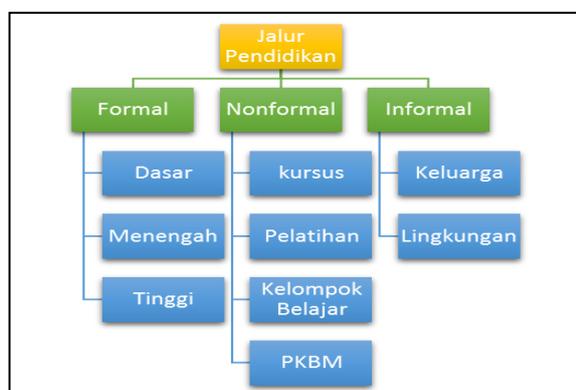
Ki Hajar Dewantara dalam Kongres Taman Siswa yang pertama pada tahun 1930 (Dewantara, K. H, 1977) menjelaskan bahwa pendidikan upaya memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelekt), dan tubuh anak; serta tidak boleh dipisah-pisahkan bagian-bagian itu agar kita dapat memajukan kesempurnaan hidup, kehidupan dan

penghidupan anak-anak yang kita didik selaras dengan dunianya.

Tujuan pendidikan memuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, pantas dan indah untuk kehidupan. Tujuan pendidikan memiliki dua fungsi yaitu memberikan arah kepada segenap kegiatan pendidikan dan merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh segenap kegiatan pendidikan (Tirtarahardja dan La Sulo, 2005: 37). Tujuan pendidikan pun bersifat normatif, yaitu mengandung unsur norma yang bersifat memaksa, tetapi tidak bertentangan dengan hakikat perkembangan peserta didik serta dapat diterima oleh masyarakat sebagai nilai hidup yang baik.

b. Ruang Lingkup Pendidikan

Ruang lingkup pendidikan meliputi jalur pendidikan formal, nonformal dan informal, ruang lingkup pendidikan dapat dilihat pada gambar 1



Gambar 1 Ruang Lingkup Pendidikan

Berikut secara rinci deskripsi masing-masing ruang lingkup pendidikan:

1) Pendidikan di Sekolah (formal)

Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. *Pertama* Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar bagi setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Pendidikan dasar berbentuk: a) Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat; b) Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat. *Kedua* pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar, terdiri atas: a) pendidikan menengah umum (SMA dan MA); dan b) pendidikan menengah kejuruan (SMK dan MAK); dan *ketiga* pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma (D3), sarjana (S1), magister (S2), spesialis, dan doktor (S3) yang

diselenggarakan oleh perguruan tinggi, dalam bentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, dan institut, atau universitas.

2) Pendidikan dalam masyarakat (nonformal)

Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang dan diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Pendidikan nonformal meliputi: a) pendidikan kecakapan hidup; b) pendidikan anak usia dini; c) pendidikan kepemudaan; d) pendidikan pemberdayaan perempuan; e) pendidikan keaksaraan; f) pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja; g) pendidikan kesetaraan; dan h) pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, dan satuan pendidikan yang sejenis.

3) Pendidikan dalam keluarga (Informal)

Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Dalam awal siklus perkembangan kehidupan seorang individu, secara nyata keluarga merupakan lembaga pertama yang dikenalnya. Keluarga merupakan suatu lembaga atau unit sosial terkecil di masyarakat yang terbentuk melalui perkawinan yang sah biasanya terdiri atas ayah, ibu dan anak yang hidup disuatu tempat. Pendidikan dalam keluarga terdiri atas: a) Pendidikan iman; b) Pendidikan moral; c) Pendidikan fisik; d) Pendidikan intelektual; e) Pendidikan psikis; f) Pendidikan sosial; dan g) Pendidikan seksual,

c. Pranata Pendidikan

Pranata Pendidikan merupakan sistem tingkah laku sosial yang bersifat resmi serta adat istiadat dan norma yang mengatur tingkah laku itu. Pranata pendidikan memiliki aturan dan disiplin baku yang bertujuan mempersiapkan anak didiknya melalui pengajaran dan pendidikan ilmu pengetahuan sehingga mampu berkompetensi dalam kehidupan, mampu berpikir ilmiah dan logis serta mampu memilah hal-hal yang baik dan buruk.

d. Fungsi Pranata Pendidikan

Fungsi Pranata Pendidikan meliputi:

a) Fungsi konservasi (pengawetan), yaitu pendidikan sebagai upaya pelestarian dan pengawetan terhadap kebudayaan suatu masyarakat dan generasi ke generasi berikutnya; b) Fungsi evaluatif (penilaian), yaitu pendidikan dapat berkembang sesuai dengan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi; dan c) Fungsi kreatif, yaitu pendidikan dapat diupayakan untuk memperbaiki, mengembangkan atau menciptakan hasil kebudayaan baru.

2. Pendidikan di Lingkungan Keluarga

Keluarga sebagai bentuk pendidikan luar sekolah memiliki landasan yuridis yang kuat dalam Undang-undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab IV, pasal 9 ayat 1 menerangkan bahwa satuan pendidikan menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan di sekolah dan luar sekolah meliputi keluarga, kelompok belajar, kursus, dan satuan pendidikan yang sejenis. Selain itu Peraturan pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah menjelaskan pendidikan luar sekolah yang sangat mendasar sifatnya adalah pendidikan keluarga.

Hasil kajian Colley, Charles, H (1994) keluarga adalah lembaga pendidikan pertama yang berfungsi menanamkan nilai nilai dan karakter yang akan membentuk

kepribadian individu dan keluarga sebagai kelompok inti yang merupakan dasar dalam pembentukan kepribadian. Sunarsih (2010) berpendapat pendidikan dalam keluarga yang tepat dan benar, merupakan modal dasar bagi perkembangan kepribadian anak untuk masa dewasanya. Selain itu asal-usul kata yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara (Dewantara, K. H, 1977; Abu & Nur, 2001: 176), bahwa keluarga berasal dari bahasa Jawa yang terbentuk dari dua kata yaitu kawula dan warga. Didalam bahasa Jawa kuno kawula berarti hamba dan warga artinya anggota. Secara bebas dapat diartikan bahwa keluarga adalah anggota hamba atau warga saya. Artinya setiap anggota dari kawula merasakan sebagai satu kesatuan yang utuh sebagai bagian dari dirinya dan dirinya juga merupakan bagian dari warga yang lainnya secara keseluruhan.

Ditinjau dari sudut pandang pedagogis, ciri khas suatu keluarga ialah bahwa keluarga itu merupakan suatu persekutuan hidup yang dijalani rasa kasih sayang di antara dua jenis manusia, yang bermaksud untuk saling menyempurnakan diri, terkandung juga kedudukan dan fungsi sebagai orang tua. Jadi dapat disimpulkan bahwa suatu keluarga dapat dikatakan keluarga lengkap apabila keluarga tersebut terdiri atas ayah, ibu, dan anak. (Sadulloh, 2010: 187).

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keluarga merupakan lingkungan dalam sistem sosial, di mana orang yang menjadi anggota lingkungan tersebut memiliki hubungan darah melalui ikatan pernikahan yang sah yang terdiri dari ayah, ibu dan anak dan tinggal dalam satu rumah.

Orang tua atau keluarga diharapkan memahami pentingnya penanaman kesadaran terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pendidikan nilai-nilai moral sejak dini. Diharapkan terjadi perubahan sikap dan perilaku seluruh anggota keluarga menjadi insan-insan yang mempunyai kepribadian yang matang dan budi pekerti yang baik, penuh rasa cinta kasih, saling menghargai dan menghormati, taat serta mampu menciptakan suasana harmonis dalam keluarga dan masyarakat serta bangsa (BKKBN, 2002)

3. Pendidikan di Lingkungan Sekolah

a. Pendidikan sekolah dalam pandangan Aliran Esensialisme

Esensialisme, merupakan mazhab filsafat pendidikan yang menerapkan prinsip idealisme dan realisme secara ekletis. Mazhab ini mulai dominan di Eropa sejak adanya pertentangan di antara para pendidik sehingga mulai timbul pemisahan antara pelajaran teoretik (*liberal arts*) yang memerdekakan akal dengan pelajaran praktik (*practice arts*).

Tujuan Pendidikan esensialis menganggap tujuan pendidikan harus mengarahkan manusia pada terbentuknya lembaga pendidikan baik swasta maupun negeri yang adil, terampil dan murah hati. Pembelajaran informal membantu, tapi ini seharusnya hanya pelengkap dan sekunder. Esensialis percaya bahwa keterampilan, pengetahuan dan sikap yang dibutuhkan oleh individu yang bersesuaian dengan realitas kehidupan harus direncanakan secara sistematis. Mereka menekankan otoritas guru dan nilai kurikulum materi pelajaran (Griese, A. A, 1981).

Esensialis mengemukakan bahwa sekolah harus melatih atau mendidik siswa untuk berkomunikasi dengan jelas dan logis, keterampilan-keterampilan inti kurikulum haruslah berupa membaca, menulis, berbicara dan berhitung, serta sekolah memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan penguasaan terhadap keterampilan-keterampilan tersebut. Menurut filsafat esensialisme, pendidikan sekolah harus bersifat praktis dan memberi pengajaran yang logis yang mempersiapkan untuk hidup mereka, sekolah tidak boleh mempengaruhi atau menetapkan kebijakan-kebijakan sosial. (Zeigler, E. F & Vanderzwaang, H. J, 1968).

Bagi penganut esensialisme pendidikan merupakan upaya untuk memelihara kebudayaan, "*Education as*

Cultural Conservation". Mereka percaya bahwa pendidikan harus didasarkan kepada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak peradaban umat manusia. Kebudayaan merupakan hal yang esensial yang mampu mengemban hari ini dan masa depan umat manusia (Mohamad Noor Syam, 1984).

Pendidikan bertujuan mentranmisikan kebudayaan untuk menjamin solidaritas sosial dan kesejahteraan umum (E.J Power, 1982). Sekolah memiliki fungsi utama yaitu memelihara nilai-nilai yang telah turun temurun, dan menjadi penuntun penyesuaian orang (individu) kepada masyarakat (Imam Barnadib, 1984). Menurut filsafat esensialisme pendidikan sekolah harus bersifat praktis dan member anak-anak pengajaran yang logis yang mempersiapkan mereka untuk hidup, sekolah tidak boleh mencoba mempengaruhi atau menetapkan kebijakan-kebijakan sosial.

Tujuan pendidikan esensialisme adalah "mempersiapkan manusia untuk hidup". Namun hidup sangat kompleks dan luas sehingga kebutuhan-kebutuhan untuk hidup berada diluar wewenang sekolah. Hal ini tidak berarti bahwa sekolah tidak dapat memberikan kontribusi untuk memepersiapkan hidup tersebut. kontribusi sekolah terutama bagaimna merancang sasaran mata pelajaran sedemikian rupa, terutama tujuan pelajaran yang dapat

dipertanggungjawabkan, yang pada akhirnya memadai untuk mempersiapkan manusia hidup. Dalam mencapai tujuan tersebut kaum esensialis menolak rekonstruksinisme (*neoprogresivisme*) yang berpandangan bahwa sekolah harus menjadi lembaga yang aktif untuk melakukan perubahan sosial, apalagi harus bertanggung jawab seluruh pendidikan bagi generasi muda.

Kurikulum direncanakan dan diorganisasi oleh orang dewasa atau guru sebagai wakil masyarakat, *society centered*. Hal ini sesuai dengan dasar filsafat idealisme dan realisme yang menyatakan bahwa masyarakat dan alam (realisme) atau masyarakat dan yang absolute (idealisme) mempunyai peranan menentukan bagaimana seharusnya individu (peserta didik) hidup. Kurikulum esensialis menekankan pengajaran fakta-fakta: kurikulum itu kurang memiliki kesabaran dengan pendekatan-pendekatan tidak langsung dan introspektif yang diangkat oleh kaum progresivisme. Kurikulum esensialisme seperti halnya kurikulum perenialisme yaitu kurikulum yang berpusat pada mata pelajaran (*subject matter centered*). Penguasaan terhadap materi kurikulum merupakan dasar yang esensial bagi *general education* (filsafat, matematika, IPA, sejarah. Bahasa, seni, dan sastra) yang diperlukan dalam hidup.

Dalam hal metode pendidikan esensialisme menyarankan agar sekolah-sekolah mempertahankan metode-metode tradisional yang berhubungan dengan disiplin mental yang menekankan pada inisiatif guru.

Peranan Guru atau pendidik berperan sebagai mediator atau “jembatan” antara dunia masyarakat dengan dunia anak. Guru juga berperan sebagai pengarah dalam proses belajar mengajar. Dengan demikian inisiatif dalam pendidikan ditekankan pada guru, bukan peserta didik (G. Kneller, 1964). Peranan peserta didik adalah belajar, bukan untuk mengatur pelajaran. Menurut idealism belajar yaitu menyesuaikan diri pada kebaikan dan kebenaran seperti yang telah ditetapkan oleh yang (G. Kneller, 1964). Menurut realism belajar berarti penyesuaian diri terhadap masyarakat dan alam.

Prinsip-prinsip pendidikan esensialisme adalah sebagai berikut: a) Pendidikan harus dilakukan melalui usaha keras, tidak begitu saja timbul dari dalam diri siswa; b) Inisiatif dalam pendidikan ditekankan pada guru, bukan pada siswa. Peranan guru adalah menjembatani antara dunia orang dewasa dengan dunia anak. Guru disiapkan secara khusus untuk melaksanakan tugasnya, sehingga guru lebih berhak untuk membimbing pertumbuhan peserta didiknya (Kneller,

1964: 59); c) Inti proses pendidikan adalah asimilasi dari mata pelajaran yang telah ditentukan. Kurikulum diorganisasi dan direncanakan dengan pasti oleh orang dewasa. Esensialisme mengakui bahwa pendidikan akan mendorong individu untuk merealisasikan potensialitasnya; d) Sekolah harus mempertahankan metode-metode tradisionalyang bertautan dengan disiplin mental; dan e) Tujuan akhir pendidikan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umum merupakan tuntutan demokrasi yang nyata.

b. Pendidikan sekolah dalam pandangan Aliran Perennialisme

Perennialisme, yang memiliki persamaan dengan esensialisme, yakni keduanya membela kurikulum tradisional yang berpusat pada mata pelajaran pokok. Perbedaannya, perennialisme menekankan keabadian teori kehikmatan yaitu : pengetahuan yang benar (truth), keindahan (beauty), dan kecintaan kepada kebaikan (goodness).

Aliran perennialisme merupakan paham filsafat pendidikan yang menempatkan nilai pada supremasi kebenaran tertinggi yang bersumber dari Tuhan. Karakteristik atau cara berpikirnya berakar dari filsafat realisme kaum Gereja. Aliran filsafat pendidikan ini mencoba membangun kembali cara berpikir Abad Pertengahan yang meletakkan keseimbangan

antara moral dan intelektual dalam konteks kesadaran spiritual. Dengan menempatkan kebenaran supranatural sebagai sumber tertinggi, maka nilai dalam pandangan aliran perrenialisme selalu bersifat theosentris. Harga nilai telah ditetapkan oleh Tuhan dan upaya manusia harus selalu diarahkan pada tujuan pencapaian nilai yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Komar (2006: 158) menjelaskan beberapa hal tentang Perennialisme, yaitu: a) Perennialisme berakar pada tradisi filosofis klasik yang dikembangkan oleh Plato, Aristoteles, Santo Thomas Aquinas; b) Sasaran pendidikan ialah kemampuan menguasai prinsip kenyataan, kebenaran, dan nilai-nilai abadi dalam arti tak terikat oleh ruang dan waktu; c) Nilai bersifat tak berubah dan universal; dan d) Bersifat regresif (mundur) dengan memulihkan kekacauan saat ini melalui nilai zaman pertengahan (renaissance) (Mateo, A. San Rosalinda & Tangco, G. M, 2013).

c. Pendidikan sekolah dalam pandangan Aliran Progresivisme

Teori pendidikan progresivisme ini berbeda dengan pandangan tradisional seperti esensialisme dan perennialisme. Gerakan Thailand adalah bagian dari gerakan reformasi umum yang mencirikan kehidupan Amerika di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Gerakan yang sering dikaitkan dengan pragmatisme John Dewey

atau experimentalisme, menekankan pandangan bahwa semua proses belajar-mengajar harus berpusat pada kepentingan dan kebutuhan anak.

Dalam "Demokrasi dan Pendidikan" Dewey, ia menguraikan bahwa pendidikan yang benar-benar progresif memerlukan filsafat berdasarkan pengalaman, interaksi orang dengan lingkungannya. Seperti filsafat eksperiensial seharusnya tidak menetapkan tujuan-tujuan eksternal, tapi, lebih tepatnya, produk akhir dari pendidikan adalah keberlangsungan pengalaman yang memperantarai arah dan kontrol pengalaman berikutnya. Sesungguhnya pendidikan progresif tidak mengabaikan masa lalu, tetapi menggunakannya untuk mengarahkan pengalaman masa depan.

Tujuan pendidikan progresif adalah untuk memenuhi kebutuhan anak yang sedang tumbuh. Sekolah harus menjadi tempat untuk belajar yang menyenangkan. Konten kurikulum berasal dari minat dan kecenderungan siswa. Metode ilmiah digunakan oleh pendidik progresif sehingga siswa dapat belajar materi dan peristiwa

secara sistematis. Penekanannya adalah pada proses-bagaimana seseorang sampai pada suatu pengetahuan / pemahaman. John Dewey adalah pendukung utama aliran filsafat ini. Salah satu prinsipnya adalah bahwa sekolah harus

memperbaiki cara hidup warga melalui pengalaman kebebasan dan demokrasi di sekolah-sekolah. Pengambilan keputusan bersama, perencanaan guru dengan siswa, topik-dipilih siswa, dan buku hanyalah alat, bukan otoritas (Dewey, 2011).

Pendidikan progresif mengembangkan teori pendidikan yang mendasarkan diri pada beberapa prinsip sebagai berikut: a) Anak harus bebas untuk dapat berkembang secara wajar; b) Pengalaman langsung merupakan cara terbaik untuk merangsang minat belajar; c) Guru harus menjadi peneliti dan pembimbing kegiatan belajar; dan d) Sekolah progresif harus merupakan suatu laboratorium untuk melakukan reformasi pedagogis dan eksperimentasi

- d. Pendidikan sekolah dalam pandangan Aliran Rekonstruksionisme

Rekonstruksionisme berasal dari kata *Reconstruct* yang berarti menyusun kembali. Dalam konteks filsafat pendidikan, aliran rekonstruksionisme adalah suatu aliran yang berusaha merombak tata susunan lama dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Aliran ini dipelopori oleh George Count dan Harold Rugg pada 1930. Mereka bermaksud membangun masyarakat baru,

masyarakat yang dipandang pantas dan adil.

Ide gagasan mereka secara meluas dipengaruhi oleh pemikiran progresif Dewey, dan ini menjelaskan mengapa aliran rekonstruksionisme memiliki landasan filsafat pragmatisme. Meskipun mereka banyak terinspirasi pemikiran Theodore Brameld, khususnya dengan beberapa karya filsafat pendidikannya, mulai dari *Pattern of Educational Philosophy* (1950), *Toward a reconstructed Philosophy of Education* (1956), dan *Education as Power* (1965).

Pada prinsipnya, rekonstruksionisme sepaham dengan aliran perenialisme, khususnya keprihatinan mereka pada kehidupan manusia modern. Kedua aliran tersebut memandang jika kehidupan manusia modern adalah zaman ketika manusia hidup dalam kebudayaan yang terganggu, sakit, penuh kebingungan, serta kesimpangsiuran proses. Menurut pandangan rekonstruksionisme, pendidikan perlu merombak tata susunan lama dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang baru, untuk mencapai tujuan utama tersebut memerlukan kerja sama antarumat manusia.

Aliran rekonstruksionisme berkeyakinan bahwa tugas penyelamatan dunia merupakan tugas semua umat manusia atau bangsa. Oleh karenanya,

pembinaan kembali daya intelektual dan spiritual yang sehat akan membina kembali manusia melalui pendidikan yang tepat atas nilai dan norma yang benar pula demi generasi sekarang dan generasi yang akan datang sehingga terbentuk dunia baru dalam pengawasan umat manusia.

Tujuan Pendidikan. Pendidikan, bagi kaum rekonstruksionis bertujuan membangkitkan kesadaran siswa tentang masalah sosial dan untuk secara aktif terlibat dalam pemecahan masalah. Guru dan sekolah harus memulai penyelidikan kritis terhadap budaya mereka sendiri. Sekolah-sekolah harus mengidentifikasi kontroversi dan inkonsistensi yang ada dan mencoba memecahkan masalah-masalah kehidupan nyata.

Kurikulum rekonstruksionis harus mencakup unsur-unsur pembelajaran untuk hidup dalam lingkungan global. Dengan demikian, kaum rekonstruksionis mengusulkan kebijakan pendidikan yang berkaitan dengan masalah nasional dan internasional sebagai alat untuk mengurangi konflik dunia. Sekolah, oleh karena itu, menjadi pusat kontroversi di mana siswa dan guru menekankan dan mendorong diskusi tentang isu-isu kontroversial dalam agama, ekonomi, politik dan pendidikan; diskusi ini tidak hanya latihan intelektual.

Metode. Kaum rekonstruksionis umumnya akan berusaha untuk menginternasionalisasikan kurikulum sehingga peserta didik akan belajar bahwa mereka hidup di sebuah desa global. Sekolah dan guru menjadi insinyur sosial yang merencanakan tindakan untuk sampai pada tujuan yang ditetapkan. Metode kelas akan berorientasi pada masalah - siswa diminta untuk menyelidiki secara kritis warisan budaya. Guru serta siswa membahas isu-isu kontroversial dan mereka didorong untuk berkomitmen dan aktif dalam perubahan sosial. Siswa dan guru berpartisipasi dalam program perubahan sosial, pendidikan, politik dan ekonomi sebagai sarana pembaharuan budaya secara keseluruhan. Kelas menjadi laboratorium percobaan pada praktek sekolah yang akan memungkinkan manusia untuk menangani masalah krisis budaya akut dan disintegrasi sosial (Welfred, C, 2005).

4. Pendidikan di Lingkungan Masyarakat

a. Pendidikan di Lingkungan Masyarakat dari Latar Budaya

Masyarakat adalah merupakan suatu kesatuan hidup dalam arti luas maupun dalam arti sempit, seperti masyarakat bangsa ataupun kesatuan kelompok kekerabatan di suatu desa, dalam suatu marga. Masyarakat dalam arti luas pada umumnya lebih abstrak apabila

dibandingkan dengan masyarakat dalam arti sempit

Masyarakat sebagai kesatuan hidup memiliki ciri seperti dikemukakan Tirtarahadja dan La Sulo (2000), yaitu:

- 1) Ada interaksi antara warga-warganya.
- 2) Pola tingkah laku warganya diatur oleh adat istiadat, norma-norma, hukum, dan aturan-aturan yang khas.
- 3) Ada rasa identitas kuat yang mengikat pada warganya. Kesatuan wilayah, kesatuan adat istiadat, rasa identitas, dan rasa loyalitas (kesetiaan) terhadap kelompoknya merupakan pengkal dari perasaan bangsa sebagai patriotisme, jiwa korps, dan kesetiakawanan sosial dan lain-lain.

Selanjutnya, kaitan antara masyarakat dengan pendidikan, menurut Tirtarahadja dan La Sulo (2000), dapat ditinjau dari tiga aspek, yaitu:

- 1) Masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan, baik yang dikembangkan (jalur sekolah dan luar sekolah) maupun yang tidak dikembangkan (jalur luar sekolah).
- 2) Lembaga-lembaga kemasyarakatan dan atau kelompok sosial di masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung, ikut mempunyai peran dan fungsi pendidikan.
- 3) Dalam masyarakat tersedia berbagai sumber belajar, baik yang dirancang,

maupun yang dimanfaatkan. Perlu pula diingat bahwa manusia dalam bekerja dan hidup sehari-hari akan selalu memperoleh manfaat dari pengalaman hidupnya itu untuk meningkatkan dirinya. Dengan kata lain manusia berusaha mendidik dirinya sendiri dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar yang tersedia di masyarakatnya dalam bekerja, bergaul, dan sebagainya.

Dari ketiga aspek di atas, aspek pertama masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan, menunjukkan bahwa masyarakat berusaha untuk menyelenggarakan pendidikan, misalnya dengan mendirikan Yayasan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal seperti pendidikan dari Taman Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi, maupun menyelenggarakan pendidikan non formal seperti kursus-kursus: tata boga, tata busana, komputer, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan sebagainya. Sedangkan pada aspek kedua dan ketigalah yang terutama menjadi kawasan dari kajian masyarakat sebagai lingkungan pendidikan. Pada aspek ketiga, di masyarakat tersedia berbagai sumber belajar, seperti kegiatan majlis ta'lim, pramuka, teman sebaya anak di mana mereka bermain bersama teman-temannya. Dari ketiga aspek tersebut dapat bedakan namun kenyataannya sukar untuk dipisahkan.

b. Pendidikan di Lingkungan Masyarakat dari Latar Organisasi

Organisasi mempunyai suatu sistem yang senantiasa mempertahankan keadaan yang harmonis, organisasi akan menolak komponen sistem yang tidak mengikuti atau meluruskannya. Upaya adanya organisasi yaitu untuk memperbaiki profesi yang baik dan konstruktif. Organisasi profesi lebih mempertajam sikap dan sifat profesi yang ditunjukkan disekolah (Ornstein, G. Levine, 2011).

Faktor suatu organisasi tidak terlepas dari perkembangan jenis bidang pekerjaan yang bersangkutan, organisasi pada dasarnya dan lazimnya dapat terbentuk atas prakarsa dari para pengembang bidang pekerjaan (Burke, R (2002). Sehingga National Education Association (NEA) dan American Federation of Teachers (AFT) sebagai organisasi yang secara teoritis dapat dimiliki suatu wibawa dan kekuatan untuk menentukan arah dan kebijakan dalam melakukan tindakan bersama untuk melindungi dan memperjuangkan kepentingan para pengembang profesi itu sendiri dan kepentingan para pengguna jasanya serta masyarakat pada umumnya (Ornstein, G. Levine, 2011).

Menurut Saud, 2007; dalam DPP ADIPSI, 2008) suatu organisasi keprofesian tidak terlepas dari perkembangan jenis bidang pekerjaan

yang bersangkutan. Tidak mengherankan, jika dalam misi organisasi keprofesian (labour force organization) pada umumnya, karenanya dapat dipahami jika organisasi federasi guru internasional juga menjadi anggota dari ILO (International Labour Organization). Dalam hal tertentu organisasi asosiasi profesi kependidikan memiliki misinya yang khas tersendiri. ILO cenderung sering menggunakan pendekatan yang bersifat politis dalam memperjuangkan kepentingannya, sedangkan organisasi keprofesian cenderung menggunakan pendekatan persaingan yang berlandaskan keunggulan komperatif (DPP ADIPSI, 2008).

Penelitian sebelumnya telah dilakukan berfokus terhadap dampak negatif dan kerugian yang timbul bila individu tidak memiliki komitmen organisasi terhadap sekolah. Misalnya, Barnes, Crowe, dan Schaefer, 2007; (dalam Crosswell, Leane, 2006) yang mengestimasi besarnya kerugian yang ditanggung sekolah dan seluruh sekolah dalam beberapa distrik di Amerika Serikat disebabkan oleh keluar-masuknya guru dari sekolah yang satu ke sekolah yang lain maupun berhentinya guru dari pekerjaannya sebagai guru. Misalnya, paling tidak 86 juta dolar per tahun terbuang hanya pada sekolah negeri di Chicago saja, belum termasuk resiko yang

dialami sekolah yang berakibat pada kinerja sekolah dan prestasi siswa. Hal ini semakin menguatkan keyakinan bahwa mengajar atau guru adalah profesi yang rumit dan banyak menuntut (demanding), tak hanya pikiran tapi juga hati guru dalam kesehariannya. Mengajar tak sekedar menyajikan fakta-fakta melainkan juga mengabdikan seluruh hati dan waktu (Day, 2004, dalam Crosswell, Leane, 2006), sehingga diperlukan pemahaman dan penyelesaian yang tepat terhadap persoalan komitmen organisasi para guru.

Komitmen guru merupakan hal yang penting untuk memahami dan menerapkan hubungan erat dengan konsep-konsep seperti: kualitas pengajaran, guru kemampuan beradaptasi, kehadiran guru, burnout guru, retensi guru, organisasi "kesehatan" dari sekolah, dan sikap dan belajar siswa hasil (Firestone, 1996; Firestone & Rosenblum, 1988; Graham, 1996; Kushman, 1992; LeCompte & Dworkin, 1991; Louis, 1998; Rosenholtz, 1989; Tsui & Cheng, 1999; dalam Gonzalez, L. E., Brown, M., & Slate, J, 2008; Celep, C, 2001). Komitmen Guru juga telah digunakan sebagai mengukur efektivitas sekolah (Ebmeier & Nicklaus, 1999; Yong, 1999). Oleh karena itu, komitmen guru dan keterlibatan dipandang sebagai dasar elemen dalam keberhasilan dan masa depan pendidikan (Huberman,

1993; Skillbeck & Connell, 2004; Watson & Hatton, 2002, dalam Gonzalez, L. E., Brown, M., & Slate, J, 2008).

Dalam penelitian lain telah mencatat bahwa guru yang berpengalaman dapat terus menunjukkan tingkat tinggi komitmen untuk mengajar, kemauan untuk terus bereksperimen dan menunjukkan dedikasi untuk siswa mereka (Crowley, 1998; Tanah-Smith, Brennan, McFadden & Mitchell, 2001; Watson & Hatton, 2002). Hari, 2004 dalam Sticher, G. Elif, 2005) berpendapat bahwa guru yang berpengalaman yang mempertahankan tingkat mereka Komitmen telah mampu ini karena mereka telah memodifikasi mereka komitmen dalam menanggapi pribadi mereka saat ini dan profesional situasi.

Berdasarkan penelitian Mowday, Porter dan Steers (1982, dalam Sticher, G. Elif, 2005), anteseden komitmen organisasi meliputi: (1) karakteristik personal yang terdiri dari usia, lama kerja, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan, kepribadian, (2) karakteristik struktural, (3) karakteristik yang berkaitan dengan pekerjaan atau jabatan yang terdiri dari tantangan pekerjaan, konflik peran ganda, dan ambiguitas peran; serta (4) pengalaman kerja antara lain terdiri dari gaya kepemimpinan, keterandalan organisasi, dan rekan kerja memberikan pengaruh terhadap komitmen organisasi. Meyer, et al.

(2002) mengelompokkan menjadi beberapa kategori yaitu, variabel demografi (demographic variables), perbedaan individual, dan pengalaman kerja.

Selanjutnya menurut Hutapea, Bonar (2012) komitmen organisasi, khususnya di Indonesia, hingga saat ini, faktor kepribadian termasuk karakteristik personal yang jarang dilibatkan dalam penelitian. Karenanya, penelitian Seniati (2002a; 2006) menjadi rujukan yang penting. Seniati (2002a) menunjukkan adanya pengaruh sifat-kepribadian terhadap komitmen organisasi dan yang paling menonjol adalah faktor agreeableness. Sedangkan studi Seniati (2006) terhadap sejumlah dosen pada Universitas Indonesia menemukan bahwa model hubungan teoritik yang terdiri dari masa kerja, sifatkepribadian, kepuasan kerja, dan iklim psikologis sesuai (fit) untuk menjelaskan komitmen dosen pada universitas, di mana masa kerja dan sifat-kepribadian memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap komitmen dosen pada universitas dibandingkan kepuasan kerja. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa sifat kepribadian memiliki pengaruh yang lebih stabil dan bertahan terhadap komitmen organisasi karena sifat kepribadian adalah sesuatu yang melekat pada diri dosen dan lebih sulit diubah. Adanya pengaruh sifat kepribadian terhadap komitmen organisasi

pada dosen juga sesuai dengan pernyataan Caldwell dan O'Reily (1990) bahwa semakin sesuai sifat-kepribadian seseorang dengan tuntutan pekerjaan (the person-job fit) maka makin baik unjuk kerja dan sikap yang berhubungan dengan pekerjaannya. Struktur kepribadian berdasarkan sifat dapat dilihat antara lain dengan menggunakan kepribadian lima besar (the big five personality) yang dikembangkan oleh Costa dan McCrae (Costa & McCrae, 1992; McCrae, et al., 1998). Kelima sifat-kepribadian tersebut adalah neuroticism, extraversion, openness to experience, agreeableness dan conscientiousness. Penjelasan masing-masing faktor sifat tersebut adalah sebagai berikut: 1) Neuroticism adalah sifat pencemas, mudah depresi, pemaarah, mudah takut, tegang, rawan kritik, serta emosional dan merupakan sifat negatif; 2) Extraversion adalah sifat mudah bergaul, banyak bicara, aktif, asertif, suka berteman, dan suka bergembira; 3) Openness to experience berisikan sifat imajinatif, kreatif, ingin tahu, memiliki pemikiran bebas dan orisinil, menyukai variasi, sensitif terhadap seni; 4) Agreeableness merupakan sifat ramah, lembut hati, percaya pada orang lain, murah hati, setuju pada pendapat orang lain, penuh toleransi dan baik hati; 5) Conscientiousness, merupakan sifat bersungguh-sungguh, bertanggungjawab,

tekun, teratur, tepat waktu, ambisius, mau bekerja keras, dan berorientasi pada keberhasilan.

Berdasarkan penjelasan sifat kepribadian lima besar di atas, menurut Hutapea, Bonar (2012) menduga bahwa terdapat korelasi sifatkepribadian dengan komitmen organisasi pada guru. Guru yang memiliki sifat-kepribadian yang sesuai dengan tuntutan dan karakteristik pekerjaan sebagai seorang pendidik sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 akan memiliki sikap positif pada sekolah tempatnya mengajar. Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang menunjukkan kaitan sifat openness to experience dengan kreativitas ilmiah dan artistik (Feist, 1998), berpikir divergen, dan memiliki pandangan politik yang lebih moderat (Judge, Heller & Mount, 2002; McCrae, 1996); Conscientiousness berkaitan dengan perilaku disiplin diri yang kuat dan berhati-hati (Erdheim, Wang & Zicker, 2006); Extraversion menunjukkan tendensi menghabiskan lebih banyak waktu dalam situasi sosial dan mengekspresikan emosi positif (Judge, Heller & Mount, 2002); Agreeableness menunjukkan sifat penolong dan pemaaf (Barrick & Mount, 1991); Neuroticism cenderung emosional dan merasa tak aman (Barrick & Mount, 1991). Lebih jauh, peneliti menduga bahwa guru yang memiliki extraversion, openness

to experience, agreeableness, dan conscientiousness yang tinggi dan neuroticism yang rendah akan memiliki kelekatan terhadap pekerjaannya sebagai guru sekaligus memiliki komitmen organisasi yang tinggi.

Menurut Hutapea, Bonar (2012) menduga, guru dengan sifat extraversion tinggi memiliki komitmen organisasi afektif yang kuat karena memiliki emosi yang positif sehingga bereaksi positif terhadap sekolah; guru dengan sifat openness to experience berkorelasi negatif dengan komitmen normatif sebab pemikirannya yang bebas dan menginginkan variasi menyebabkannya kurang menghargai sesuatu yang sangat bernilai bagi banyak orang misalnya ganjaran (reward) formal maupun informal yang lazim diterapkan agar karyawan memiliki ikatan pada organisasi. Individu dengan sifat kepribadian semacam ini umumnya tak memiliki tanggung jawab atau beban moral untuk bertahan dalam organisasi (McCrae, 1996); sifat conscientiousness pada guru akan mendorongnya memiliki komitmen berkesinambungan yang kuat sebab, menurut Organ dan Lingl (1995), individu yang memiliki disiplin diri yang tinggi, bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab akan menghargai apa yang diberikan organisasi sehingga semakin terlibat dalam

pekerjaannya; guru dengan sifat agreeableness cenderung memiliki komitmen normatif sebab sifatnya yang lembut hati, percaya kepada pihak lain, pemaaf, penuh toleransi dan baik hati, menurut Erdheim, Wang dan Zicker (2006).

KESIMPULAN

Peran masyarakat terhadap pendidikan adalah sebagai arah dalam menentukan tujuan pendidikan, sebagai sosial kontrol (fungsi pengawasan), sebagai pemberi dana, fasilitas, dan sebagai masukan dalam menentukan proses pendidikan. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan berikut:

1. Kondisi awal masyarakat Kaili di Kelurahan Tondo sebelum adanya Perguruan Tinggi Universitas Tadulako yakni masyarakat pada umumnya bermata pencaharian sebagai nelayan, kuli bangunan atau pembuat kapur dan menangkap ikan di laut, jadi belum nampak terjadinya perubahan pekerjaan.
2. Transformasi yang terjadi di bidang mata pencaharian yakni spesialisasi pekerjaan bermacam-macam, sehingga mengurangi pengangguran dengan terbukanya berbagai sektor pekerjaan di bidang informal seperti Satpam, Clening servis.

3. Dampak yang ditimbulkan adalah positif maupun negatif, secara positif membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran serta negatifnya adalah termarginalnya penduduk lokal dari tanah yang telah memberikannya kehidupan

DAFTAR RUJUKAN

- Abu, A dan Nur Uhbiyati. (2001). Ilmu Pendidikan. Jakarta: Bineka Cipta
- Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasil Pentahapan Keluarga Sejahtera Tingkat Nasional tahun 1994-2001
- Bernadib, Imam. (1986). Filsafat Pendidikan. Yogyakarta: Andi Offset.
- Burke, R (2002). Organizational Culture: A key to the success of Work and family programs. In R. Burke & Nelson (Eds). *Advancing women's careers: Research and Practice* (pp. 3-15). Malden MA: Blackwell Publishers.
- Cooley, Charles Horton, (1994). *Social Process*, Charles Schribner's Sons: New York.
- Crosswell, Leane (2006) *Understanding teacher Commitment in times of Changes: Queensland University of Technology*.

- Celep, C (2001). Teacher's Organizational Commitmen in Educational Organizations. [Online]. Dapat diakses <http://www.nationalforum.com./17celepp.htm>. Di akses 02 April 2017.
- Dewantara, K. H (1977). Karya Ki Hajar Dewantara. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.
- Dewey, J (2011) Democracy and Education. New York: Simon & Brown.
- DPP ADIPSI (2008) Peran Organisasi Profesi Dalam Peningkatan Kualitas Kompetensi Guru Pendidikan Dasar [Power Point Pdf]. Reterved from <http://www.google.com search:Peran organisasi Profesi guru>, 1 Maret 2014.
- Griese, A.A (1981) Your Philosophy of Education: What is it ?. Santa Monica: CA.
- Gonzalez, L. E., Brown, M.,& Slate, J. (2008) Teachers Who Left The Teaching Profession: A Qualitative Understanding. The Qualitative Report, 13 (1), 1-11. Retrieved from <http://www.nova.edu/ssss/QR/QR13-1/gonzalez.pdf>
- Hutapea, Bonar (2012). Sifat Kepribadian dan Dukungan Organisasi Sebagai Prediktor Komitmen Organisasi Guru Pria Di Sekolah Dasar. Jurnal Makara, Sosial Humaniora. Vol.16, No 2 Desember 2012. 101 – 115.
- Kartadinata, S (2016) Peran ilmu Pendidikan dalam Membangun Kejujuran dan Kemandirian Menuju Bangsa yang Bermartabat, Yogyakarta: Orasi Ilmiah di Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta.
- King, L & Schielmann (2004). Indigenous Education: Praticce and Perspectives. UNESCO: United Nations Educational.
- Kneller, F. George (1964) Introduction to the Philosophy of Education. University of California: Wiley.
- Mateo, A. San Rosalinda & Tangco, G. M, (2013). Foundation of Education II: Historical, Philosophical, and Legal Foundation of Education: Quezon city: Katha Publishing Co.
- Novoa, Antonio (2005) The Teaching Profession In Europe: Historical And Sociological Analysis. University of Lisbon
- Ornstein, G. Levine (2011) Foundations of education (11 th ed). Wads worth: Cengage learning.

Sticher, G. Elif (2005) Preservice Science Teachers Perception Of Profession With Metaphorical Images And Reasons Of Choosing Teaching As A Profession.

Sadulloh, Uyoh. (2015). Pedagogik (Ilmu Mendidik). Bandung: Alfabeta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003

Undang-undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional,

Wangsa Gandhi HW, Teguh. (2011). Mazhab-mazhab Filsafat Pendidikan. Ar-Ruzz Media.

Wilfred, C (2005). The Routledge Falmer Reader In Philosophy of Education. London:Routledge Falmer.

Zeigler, E. F & Vanderzwaang, H. J, (1968). Physical Education: Progresivisim or Essentialism. USA: Stipes Publishing Company.